

**PENGARUH PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A Oleh **SUSI KRISNAWATI** R
NIM. 10700113052

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

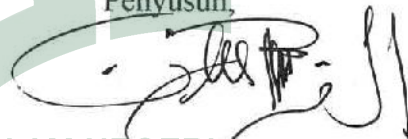
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Krisnawati
NIM : 10700113052
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 23 Agustus 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Ekonomi
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : Jl. Inspeksi Kanal Nipa-nipa Pondok Mubarak
Judul : Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2003-2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Maret 2019
Penyusun,



Susi Krisnawati
10700113052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **“Pengaruh Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar”**, yang disusun oleh **Susi Krisnawati**, NIM: 10700113052, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang **Munaqasyah** yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2019, bertepatan dengan 18 Rajab-Sya’ban 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.

Samat-Gowa, 01 April 2019
18 Rajab-Sya’ban 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.

Sekretaris : Dr. Syaharuddin, M.Si.

Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.,

Penguji II : Ismawati, SE., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Si.

Pembimbing II : Dr. Sirajuddin, SE., M.Si.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIM: 10580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang di-kandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat me-nyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang di-rintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul ***“Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar”*** penulis hadirkan sebagai salah satu pra-syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Wagimin dan Ibunda Suminah yang telah melahirkan, meng-asuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Sirajuddin, SE,M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Nurmiah Muin, S.IP,MM. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
5. Ibu Dr. Rahmawati Muin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sirajuddin, SE,M.Si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Ilmu Ekonomi UIN alauddin Makassar.
8. Kantor BPS (Badan Pusat Statistik), Kantor Dinas Tenaga Kerja di Kota Makassar dan Kantor Pusat Dinas Tenaga Kerja di kota Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Terima kasih tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda serta keluarga tercinta yang selalu memberikan suport.
10. Terima kasih tak terhingga untuk Ayah angkat saya Ir. Tjaja Jontah, yang selalu memberi dukungan dan motivasi sampai detik ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman terkhusus untuk kakanda Arjun, Heriani Amir, Irwandi Hasan, Cresnawan Sumual, dan Sulkifli Amman yang begitu banyak memberikan sumbangan waktu dan tenaganya untuk penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan angkatan 2013 dan terkhusus Kakanda Muriadi Akbar, S.Ak, selaku senior angkatan 2012 terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
13. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datang dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis,

SUSI KRISNAWATI

10700113052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xi
BIODATA.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Teori yang Melandasi Penelitian.....	11
B. Hubungan Antar Variabel.....	29
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber data	34
D. Terknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	34
F. Pengujian Hipotesis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Kota Makassar	41
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	50

C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar Tahun 2003-2017.....	42
Tabel 4.2 Perkembangan Upah Minimum di Kota Makassar Tahun 2003-2017	47
Tabel 4.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar Tahun 2003-2017	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.6 Hasil Penelitian	53
Tabel 4.7 Uji Parsial (Uji T)	56



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	31
Tabel 4.1 Grafik Histogram	50
Tabel 4.2Grafik Normal P-Plot.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53



TRANSLITERASI

QS. At-Talaq Ayat 6	5
QS Al- A'laq Ayat 1-5	11
Qs At-Thalaq Ayat 6	16
QS. Hud Ayat 6	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Susi Krisnawati
Nim : 10700113052
Judul : Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2003-2017

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2003-2017

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data runtut waktu (Time series) dari tahun 2003-2017. Analisis model menggunakan model regresi linier berganda kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik dan hipotesis, dengan bantuan SPSS 22. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, dan Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap upah minimum di Kota Makassar, sedangkan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Makassar, perlu ada pelatihan guna meningkatkan keahlian tambahan, selain itu dengan bantuan permodalan dari pemerintah dapat menjadi alternatif untuk para pengangguran untuk berwirausaha sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Kata kunci : Pendidikan, Upah Minimum, Tingkat Kemiskinan



RIWAYAT HIDUP

Susi Krisnawati, dilahirkan di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 22 Agustus 1993. Penulis merupakan anak ke-2 dari delapan bersaudara, buah hati dari Ayahanda Wagimin dan Ibunda Suminah,. Penulis memulai pendidikan di SD Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif pada tahun 1999 hingga 2005, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Diponegoro Majenang pada tahun 2005 hingga tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan SMA Maha Putra Tello Makassar pada tahun 2011 hingga tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.

Contact Person:

Email : dedezainuddin79@gmail.com

No. Hp : 085-343-655-781

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup manusia selain itu juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pendidikan yang minim serta tingkat upah minimum di kota Makassar. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk dan antar daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensional. Karena itu, proses pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan harus dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk dan Prasetyo dalam Rahmawati, 2017: 1). Kemiskinan akan terus menjadi masalah di semua Negara termasuk Indonesia yang juga merupakan Negara berkembang.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Menurut Word Bank 2004 dan Wijayanto dalam Rahmawati

(2017: 2) menyatakan bahwa salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai).

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan pilar penting untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam membangun ekonomi yang tak lain adalah untuk Investasi jangka panjang di suatu negara. Tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang ini akan membuat produktivitas dari *human capital* ini akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang terlihat dari meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Jika hal ini sudah terjadi tentu akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di daerah tersebut yang pada akhirnya ketika seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi tentu akan menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan bahkan mengalami kebodohan yang sistematis karena itu menjadi penting bagi kita semua bahwa kemiskinan dapat menjadikan kebodohan, dan kebodohan sudah jelas dan identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai yang menghubungkan antara sebab akibat di atas dengan kunci salah satunya yaitu pendidikan karena pendidikan adalah sarana untuk menghapus kebodohan serta kemiskinan. Namun ironisnya pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas yang pertama, ke-

pedulian pemerintah yang bias di katakana rendah terhadap pendidikan yang harus kalah dari urusan yang harus strategis yaitu politik (Winardi dalam Radhitya Widyasworo 2014: 6). Bahkan pendidikan di jadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar bisa menarik simpati di mata rakyat. Jika melihat Negara lain, ada kecemasan yang sangat mencolok dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) ini. Misalnya, Amerika Serikat, Mentri Perkotaan diera Bill Clinton, Hendry Cisneros, pernah mengemukakan bahwa ia hawatir tentang masa depan Amerika Serikat dengan banyaknya penduduk keturunan hispanik dan kulit hitam yang buta huruf dan tidak produktif. Yang kedua, penjajahan terselubung pada era globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju dari segi capital dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi kehidupan di negara-negara berkembang.

Penjajahan ini tidak terlepas dari unsur ekonomi dengan hutang Negara yang semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, terjadilah privatisasi di-segala bidang. Bahkan pendidikan pun, tidak luput dari usaha privatisasi ini. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu saja tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan tinggi dan itu akan ber-akibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak yang berada di sector informal akibat kualias sumber daya manusia yang rendah, dan ini salah satunya karena biaya pendidikan yang memang mahal. Ketiga, adalah kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi

bangsa yang tengah di landa krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakan, telah terjadi deprivasi relatif (istilah Karl Marks yang di populerkan Ted R.Gurr) dalam diri masyarakat. Hal ini akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap dunia pendidikan, karena mereka lebih mementingkan urusan perut daripada sekolah. Akibatnya, kebodohan akan menghantui, dan kemiskinan pun akan mengiringi. Sehingga, kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, di mana dari kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan, dan kemudian menjadi bodoh serta kemiskinan pun kembali menjerat (Wijayanto dalam Rahmawati 2017:3)

Kebijakan Upah Minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono dalam Fitriani, 2016: 4). Dan memberikan upah yang pantas terhadap pekerja pun itu wajib sebelum keringatnya mengering, Allah telah berfirman dalam QS. AT-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَ ضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs At-Talaq 65:6).

Ayat di atas sudah sangat jelas dibahas bahwa kita wajib membayarkan upah sesuai dengan apa yang di kerjakannya dan janganlah menunda-nunda atas hak dari hasil kerja, agar sekiranya di segerakan dalam pembayaran upahnya. Pada beberapa kasus yang sering di jumpai ada beberapa perusahaan yang tidak menyegerakan dalam pembayaran gaji/upah yang seharusnya diterima namun karna sesuatu hal maka upah di bayarkan dengan menunda atau mengundur waktu pembayaran upah, terkait dengan ayat tersebut di atas tentu itu tidak dibenarkan agama, ketika pekerjaan sudah selsai dikerjakan maka sudah jadi kemestian agar upah segera di bayarkan sebelum keringat itu mengering.

Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait di mana kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012 dalam Arstina dkk, 2016: 678). Pada fenomena alam yang terjadi di sekitar tempat tinggal, penulis banyak melihat warga miskin di sekitaran TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang notabenenya mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan juga kelayakan tempat tinggal yang di huni saat ini, gangguan kesehatan pun sering di alami seperti gatal, diare dan juga beberapa penyakit lainnya pada orang tua dan anak, lingkungan yang kurang bersih membuat penyakit mudah menyerang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis sebagai peneliti, sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana “Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar?

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut dengan variabel prediktor. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan nilai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan (X_1) dan upah minimum (X_2).

Tingkat pendidikan diukur dengan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah dalam penelitian ini angka partisipasi sekolah di kota Makassar pada tahun 2003-2017 diperoleh dari publikasi BPS Kota Makassar. Sedangkan upah minimum didapat

dilihat dari besarnya upah minimum di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003-2017 yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan (Y). Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di kota Makassar pada tahun 2003-2017 yang diperoleh dari publikasi BPS Kota Makassar.

D. *Kajian Pustaka*

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, udah ada beberapa variabel yang tidak sama dengan judul yang berbeda namun beberapa dari kajian yang sudah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu penulis mencoba merangkumkan dari beberapa sumber yang diyakini dapat menghasilkan buah pemikiran yang baru dengan judul yang lebih variatif yang berpedoman dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan penyusun berbeda dalam obyeknya, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan Kurnia Rahmawati (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013” menurutnya bahwa variabel Pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi

tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk Provinsi DIY memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan supaya dapat menekan tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota DIY.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) yang berjudul “Analisis Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh” Universitas Teuku Umar Meukaboh, Aceh Barat pada Fakultas Ekonomi Pembangunan. Kebijakan Upah Minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Penelitian pada jurnal riset ekonomi dan manajemen Kurniawan dkk (2017) yang berjudul “Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2006-2014” menurutnya kenaikan Upah minimum memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kemiskinan pada masing-masing Negara. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan karakteristik di setiap Negara. Penduduk Negara maju dan berkembang akan merasa-

kan manfaat yang berbeda dari kenaikan upah minimum karena dinegara maju Upah didominasi oleh tenaga kerja terdidik (*skilled worker*). Sedangkan tenaga kerja di Negara berkembang di domonasi oleh tenaga kerja tidak terdidik (*unskilled worker*) yang lebih rentan terhadap *Shock* dan mempunyai *Bargaining power* yang rendah.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Arstina dkk (2016) dalam Jurnal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”. Ia menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait di mana kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, sementara variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar
2. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teori

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berpartisipasi aktif.
- b) Sebagai bahan Evaluasi bagi Masyarakat pada umumnya dan terkhusus untuk kota Makassar sendiri.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai pengembangan Studi Ilmu Ekonomi dan bahan edukasi serta Evaluasi bagi Kota Makassar khususnya, dan Negara Indonesia umumnya.
- b) Dapat dijadikan wawasan sebagai sumbangan informasi bagi yang berniat untuk mengadakan penelitian yang lebih jauh tentang permasalahan pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan Kota Makassar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori yang Melandasi Penelitian

1. Pendidikan

Allah berfirman dalam QS Al- A'laq Ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

Terjemahnya :

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang mahamulia (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tak di ketahuinya. (QS Al-Alaq 96:1-5)

Bacalah, wahai Nabi, al-Qur'an yang di turunkan kepadamu, dimulai dengan menyebut nama Rabbmu yang hanya dia sajalah yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal manusia dari darah beku yang berwarna merah. Bacalah, wahai Nabi, apa yang di turunkan kepadamu. Sesungguhnya Rbbmu sungguh banyak memberikan kebaikan lagi luas kemurahannya. Dialah yang mengajarkan manusia menulis dengan pena, dan mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Dialah yang membawanya dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. (Tafsir Al-Muyassar 2011: 784).

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “didik” (mendidik). Brodjonegoro dalam Suwarno (1982 : 1-2) menyebutkan beberapa istilah pendidikan di antaranya: *paedagogiek* (ilmu menuntun anak), *opvoeding* (membesarkan), *panggulawentah* (mengubah) *educare* (melatih

atau mengajarkan) dan *erzhicung* (membangkitkan atau mengaktifkan). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, kemudian Brodijonegoro menerjemahkan pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai terciptanya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya.

Berikutnya akan di kemukakan beberapa pendapat dari berbagai sumber tentang pengertian pendidikan. Definisi pendidikan secara etimologis dijelaskan oleh Carter V. Good dalam kamus *Dictionary of Education* sebagai berikut: *Pedagogy* (a) *the art, practice of proffesion of teaching* yang berarti seni, praktik, atau profesi sebagai pengejar (pengajaran) (b) *the systematized learning or instruction conering principles and methods of teaching and of student control and guidance ; lagerly replected by the term of education*. Dengan arti bahwa ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat). *Education*, mengandung makna: a) proses perkembangan pribadi, b) proses sosial, c) rangkaian pelajaran (kursus) profesional, d) seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diawasi/dikembangkan generasi bangsa (Syam, 1988 : 34).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, bahwa pendidikan dapat didefinisikan: 1) sebagai suatu ilmu yang tersusun atas prinsip dan metode, yang tersusun secara sistematis (terorganisasi) di gunakan untuk mengajar murid secara (terorganisasi) di gunakan untuk mengajar murid secara tidak langsung mengarahkan pada definisi pendidikan sekolah, dan 2) sebagai sebuah proses yang terjadi di lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat).

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah bimbingan/pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang tua dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa (Suprianto, dkk. 2017 : 191). Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan. Pendidikan berhubungan erat dengan pembangunan karakter, pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Majid (2014 : 18) pendidikan bertujuan untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berakarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu biasanya akan memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam

segala aspek kehidupan dimasa mendatang. Jadi, pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikan.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa (Majid, 2014 : 18). Menurut Gillis (2000) dalam Rika dkk (2012 : 150-151) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting: a) Terdapat banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat dimana saja percaya bahwa pendidikan dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka dan juga anak-anak mereka. Namun di negara-negara berkembang masih banyak yang belum dapat menampung permintaan pendidikan, karena belumbanyak terdapat sekolah terutama dipedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya, sehingga masih banyak terdapat penduduk yang belum dapat mengenyam pendidikan; dan b) Alasan lainnya adalah karena telah banyak dilakukan observasi yang menyebutkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat akan dapat terangkat. Walaupun akan dapat terangkat. Walaupun tidak semua orang yang menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari yang tidak bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya, namun rata-rata mereka yang menyelesaikan sekolahnya menghasilkan pendapatan lebih banyak. Karena itu, orang-orang di seluruh dunia menyadari hal itu sehingga mereka berusaha agar anak-anak mereka nanti mendapatkan hal ini terjadi karena masyarakat pendidikan yang tinggi. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal: (1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat; (2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; dan (3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- b) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- b) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lainlain.

- c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Nugroho, 2015: 18-19).

2. Upah Minimum

Allah berfirman dalam Qs At-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْشَرَضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs At-Talaq 65:6).

Tempatkanlah wanita-wanita yang ditalak dari istri-istri kalian pada masa iddah mereka seperti tempat tinggal kalian sesuai kekuasaan dan kemampuan kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, untuk menyempitkan mereka di tempat tinggal mereka. Jika istri-istri kalian yang di talak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka dalam masa iddah mereka hingga mereka melahirkan kandungan mereka. Lalu jika mereka menyusukan anak-anak kalian untuk kalian dengan upah, maka bayarlah upah mereka, dan musyawarahkan kalian satu sama lain dengan lapang dada dan kerelaan hati. Dan jika kalian tak bersepakat atas penyusuan ibi, maka boleh wanita lain selain ibunya menyusukan anak itu bagi ayahnya. (Al-Muyassar 2011: 631)

Tingkat Upah Pekerja, baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia selama periode 1997-1999 tampak lebih baik. tetapi jika di bandingkan dengan upah yang diterima antara pekerja laki-laki dan perempuan, ternyata lebih banyak pekerja perempuan yang mendapatkan upah lebih rendah di bandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya laki-laki lebih banyak menerima upah yang relatif lebih tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan (Merdekawaty dkk, 2016: 526). Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan (Sumarsono, 2003: 86).

Upah minimum di Indonesia sejak Januari 2001, otoritas penetapannya didesentralisasikan kepada Gubernur. Regulasi terkait dengan upah minimum masih menjadi tanggung jawab kementerian ketenagakerjaan, termasuk menerbitkan pedoman komponen Kebutuhan Hidup Layak yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan upah minimum (Kurniawan dkk, 2017: 237). Upah minimum di Indonesia selain dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup pekerja yang dianggap masih menerima upah di bawah standar nasional juga untuk melindungi pekerja yang tidak memiliki bargaining power karena adanya surplus tenaga kerja tidak terampil (*unskilled worker*). Dalam perkembangan selanjutnya kenaikan upah minimum didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015).

Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 05 Tahun 1989, UMK adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari UMP. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." Upah minimum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1999

tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi 2 yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II). Namun, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).

b) Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua

macam yaitu: a) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja; b) Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada: a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya; b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja; c) Produktivitas marginal tenaga kerja; d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; dan e) Perbedaan jenis pekerjaan.

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun sub-sektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum

sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU Nomor 13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak, tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM. Pada masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini: a) Kebutuhan hidup minimum (KHM); b) Index Harga Konsumen (IHK); c) Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya; d) Standar upah minimum di daerah sekitar; e) Kondisi pasar kerja; dan f) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Sumarsono (2009 : 151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu: a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; c) menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Selanjutnya

Sumarsono (2009: 201) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Tujuan Penetapan Upah Minimum Menurut Rachman dalam Zulkifli (2016: 98-99), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Secara Mikro: (1) Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, (2) Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan; (3) Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah; b) Secara Makro: (1) Pemerataan pendapatan; (2) Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, (3) Perubahan struktur biaya industri sektoral; (4) Peningkatan produktivitas kerja nasional; (5) Peningkatan etos dan disiplin kerja; dan (6) Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha

3. Kemiskinan

Allah Berfirman dalam QS. Hud Ayat 6:

وَمَا مِنْ آبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦

Terjemahnya:

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya di jamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfuz). (Qs Hud 11: 6)

Intisari dari ayat ini adalah Allah telah menjamin Rizki semua yang melata di permukaan bumi sebagai karunianya. Dia mengetahui tempat berdiamnya semasa hidupnya maupun setelah kematiannya, serta dia mengetahui tempat

dimana ia akan mati. Seluruhnya telah tertulis dalam kitab di sisi Allah yang menjelaskan semua itu. (Al-Muyassar 2011: 83)

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Annur, 2013: 413). Definisi kemiskinan menurut Qurratu'ain dan Ratnasari (2016: 267) adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan menurut Ahmad (2003: 344) kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Terdiri dari sandang, pangan dan papan.

Jenis-jenis Kemiskinan Menurut Djojohadikusumo (1995) dalam Annur (2013: 414) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau

dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi.

Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya adalah (Noor, 2014:133):

- a) Kemiskinan absolute, yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum.
- b) Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatanlainnya
- c) Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompokorang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.
- d) Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

Suharto (2006 : 148-149) mengatakan bahwa ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu :

- a) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin.Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kamiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- b) Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- c) Kelompok rentan (*vulnerable grup*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik

ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997) dalam Sartika dkk (2016: 109) antara lain:

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c) Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Nasikun (2001) dalam Suryawati (2005: 123) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a) *Policy induces processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

- b) *Socio-economic dualism*: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c) *Population growth*: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedang pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d) *Resources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e) *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f) *The marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua.

Sedangkan menurut Hartomo dan Azis (2009: 28-29), beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu :

- a) Pendidikan yang Terlampau Rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
- b) Malas Bekerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersifat acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

- c) Keterbatasan Sumber Alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
- d) Terbatasnya Lapangan Kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
- e) Keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dalam suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- f) Beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dapat disebabkan oleh karena sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, sulitnya memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Sulitnya seseorang dalam memperoleh pendidikan akan menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Seiring perkembangan zaman lapangan kerja yang tersedia akan mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dalam masa pendidikan banyak masyarakat yang tidak menempuh sebagaimana mestinya maka masyarakat tersebut akan

mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kesulitan mencari pekerjaan ini akan mengakibatkan seseorang kesulitan memperoleh pendapatan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Maulida dan Soejoto, 2015: 228).

Jika tingkat pendapatan kecil, sedangkan jumlah jiwa yang harus ditanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan adalah untuk konsumsi, sedangkan porsi untuk di tabung kecil sekali bahkan tidak ada akibatnya pembentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah sehingga kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. Amartya Sen dalam Todaro, berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif.

Mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan dan motivasi untuk maju, maka penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan rakyat. Pada kenyataannya tanpa perbaikan kualitas faktor manusia tidak mungkin ada kemajuan. Jadi, dapat diketahui bahwa negara itu miskin karena memiliki penduduk yang tidak berkualitas. Meskipun dilakukan pembangunan fisik seperti jalan, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya, tetapi manusianya tidak berkualitas modal fisik tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik (Jhingan, 2007 : 417).

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum wanita. Jika dibandingkan standar hidup penduduk termiskin di berbagai Negara-negara berkembang,

akan terungkap fakta bahwa hampir di semua tempat yang paling menderita adalah kaum wanita beserta anak-anak. Merekalah yang paling menderita kemiskinan atau kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial yang lainnya (Todaro, 2003: 256).

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah dapat dihitung dengan menggambarkan sebuah garis kemiskinan. Idealnya, garis ini definisikan sebagai pendapatan perkapita/rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan perkapita dibawah garis kemiskinan dapat dikatakan miskin, sementara mereka yang mempunyai pendapatan diatas garis kemiskinan dapat dikatakan tidak miskin. Garis kemiskinan digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin. Garis kemiskinan didapatkan dari hasil survei modul konsumsi Bapenas yang ditetapkan dalam rupiah per orang per bulan (Ginting dan Rasbin, 2010: 287).

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas (Annur, 2013: 416).

B. Hubungan Antara Variabel

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar. Hal itu diyakini sebagai tali simpul untuk mengurangi benang kusut masalah kemiskinan. Dengan membangun landasan pendidikan yang kokoh diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan utama bangsa. Sebab, pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin, dan 2) pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dan harus ditopang dengan tenaga kerja terdidik, yang punya pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas (Ustama, 2008: 8).

Pendidikan sangat berpengaruh penting terhadap kemiskinan, salah satu permasalahan yang dialami oleh negara berkembang adalah kurangnya edukasi mengenai pendidikan yang berdampak pada pemikiran-pemikiran kuno yang tidak begitu paham akan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan sering kali di-sepelekan oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Pendidikan ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di suatu negara, karena tak dapat dipungkiri bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor formal adalah mereka-mereka yang memiliki kriteria penting yang menjadi bahan pertimbangan pada setiap instansi pekerjaan di sektor formal yaitu dilihat dari pendidikan yang ditamatkan.

Secara umum, kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Kenyataannya dapat kita lihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Jika seseorang sudah bisa terserap dalam dunia kerja tentu ia akan mendapat penghasilan yang juga mampu untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Karena dengan gaji tersebut seseorang bisa lebih sejahtera dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Kota Makassar khususnya dan Negara Indonesia umumnya.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Klasik berpandangan bahwa jumlah pekerja relatif sangat elastis terhadap tingkat upah. Bila upah naik melebihi tingkat subsisten maka jumlah penduduk (dan karenanya jumlah tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat. Sejumlah tenaga kerja yang tidak “bermutu” tidak akan menghasilkan output yang banyak. Lebih dari itu tenaga kerja yang tidak “bermutu” juga harus di beri makan. Karena itu, tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbang output tetapi juga mereka ikut memakan output yang tidak mereka hasilkan (tenaga kerja yang tidak bermutu) maka hasilnya jelas akan mengurangi pendapatan perkapita.

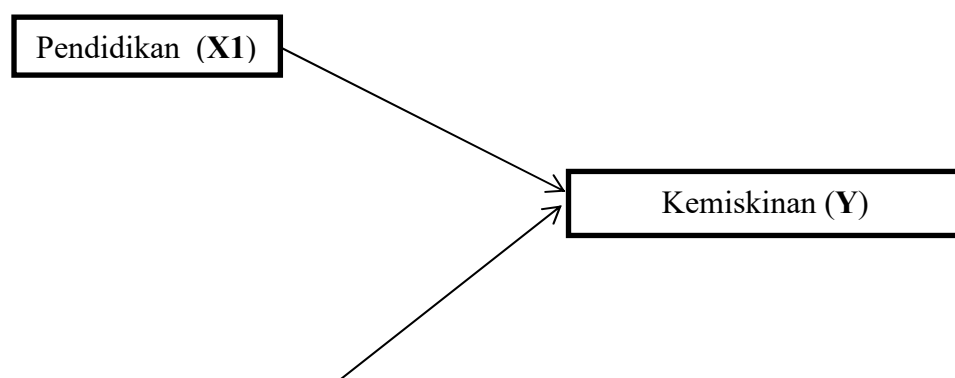
Maka, tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah yang besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya output perkapita rendah. Mulyadi Subri (2004:174). Jika upah tidak memadai atau di bawah upah minimum tentu itu menghambat, sehingga tidak menutup kemungkinan upah ini akan dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan di suatu Kota atau Negara. Upah

yang ditetapkan oleh pemerintah akan sangat berdampak pada kehidupan rakyatnya sendiri. Semakin tinggi tingkat upah yang diberikan maka tingkat kesejahteraan pun meningkat karena kemampuan/daya beli masyarakat menjadi meningkat, dalam hal ini tentu akan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan mengurangi angka kemiskinan.

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yacoub 2012: 178). Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi kemiskinan yang ada (Zuhdiyaty dan Kaluge: 2017: 28).



C. *Kerangka Pikir*



Upah Minimum (X2)

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. *Hipotesis*

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan maka hipotesis dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.
2. Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 14) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat di analisis berdasarkan prosedur statistik

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Makassar khususnya di Kantor Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (Jl. Haji Bau No: 6 Mariso) dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Makassar (Jl. A.P. Pettarani No: 98 Bua Kana) Sulawesi Selatan.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 2013: 26).

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan adalah data *time series* 2003 sampai dengan 2017 dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang ada, misalnya berupa dokumen, instansi-instansi yang terkait, dan data lainnya yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yaitu pengumpulan data berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang di gunakan dalam penelitian ini, instansi-instansi yang terkait, dan sumber lainnya, hal ini berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun melalui internet. Hasil dari data tersebut digunakan untuk analisis selanjutnya dan membuktikan apa yang telah dihipotesiskan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model regresi berganda (*Multiple Regression*). Persamaan regresi ber-

ganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam menganalisa. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terkait, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. Model ini memperlihatkan hubungan variabel bebas dengan variabel terkait, digunakan untuk melihat pengaruh antara Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar.

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi berganda, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a) Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- (1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada penelitian tersebut.

(2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gangguan multi-kolonieritas pada penelitian tersebut. (Ghozali, 2016: 104).

b) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik, di mana semua bagian dari uji asumsi klasik harus terpenuhi untuk melanjutkan uji regresi berganda (Ghozali, 2016: 154). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: 1) grafik histogram dan 2) grafik *normal probability plot*. Pada grafik *normal probability plot* data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal (Ghozali, 2016: 156). Pada grafik histogram data dikatakan normal apabila sisi kiri dan sisi kanan garis seimbang.

c) Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu apabila adanya *Time series* atau korelasi antara tempat berdekatan apabila *Cross sectional*. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Klarifikasi nilai durbin waston yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

d) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized Delete Residual* nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang di prediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut sehingga dapat di katakan model tersebut homokedastisitas.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Analisis pada gambar *scatterplot* yang menyatakan model regresi linear berganda tidak dapat Heteroskedastisitas jika:

- (1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- (2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- (3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- (4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

F. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis H_1 , dan H_2 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Tingkat kemiskinan
α	=	Konstanta
X_1	=	Pendidikan
X_2	=	Upah Minimum
$\beta_1 - \beta_2$	=	Koefisien regresi berganda
e	=	Error term

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

2. Pengujian Signifikansi Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen dimana jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, Maka H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel independen atau (tidak signifikan), artinya perubahan yang

terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, di mana tingkat signifikansi yang di gunakan yaitu 0,5%. Ada dua cara untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak yaitu:

a) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- (1) Apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang diperjelas secara signifikan.
- (2) Apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang di jelaskan secara signifikan.

b) Melihat *Probabilities Values*

Berdasarkan nilai probabilitas dngan $\alpha = 0,05$:

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel devenden.

3. Pengujian Signifikansi Parameter Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji regresi berganda. Ada dua cara untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak yaitu:

a) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- (1) H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (2) H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Melihat *Probabilities Value*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kota Makassar*

1. Sejarah Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor barat dan utara, lazim dikenal sebagai kota dengan ciri "Waterfront City", didalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang). Sungai Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara ke bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Sungai Pampang yang bermuara di bagian utara Kota Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik dimusim kemarau

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan, dan pusat kegiatan industri di Kota Makassar. Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak dimanfaatkan, seperti menjadikannya sebagai jalur alternatif baru bagi transportasi kota. Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Dua tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 27,0°C sampai dengan 29,0°C. Pada tahun 2017 curah hujan terbesar terjadi pada Bulan Desember, Januari, November, Maret, dan Februari dengan rata-rata curah hujan 311 mm dan jumlah hari hujan rata-rata berkisar 17 hari.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Diantara 15 Kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki Batas-batas: a) Wilayah sebelah Utara Berbatasan dengan kabupaten Maros; b) Wilayah Sebelah Timur Berbatasan dengan kabupaten Maros; c) Wilayah sebelah Selatan Berbatasan dengan kabupaten Gowa; dan d) Wilayah sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: a) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir

pantai; dan b) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini. Jumlah Penduduk Kota Makassar 2016 diproyeksikan 1.469.601 Jiwa, lalu pada tahun 2017 angka ini mengalami peningkatan sebanyak 300.319, dan pada Tahun jumlah penduduk mencapai 20171.769.920 Jiwa.

2. Perkembangan Pendidikan Di Kota Makassar

Keberhasilan pembangunan Kota Makassar dalam bidang pendidikan pada tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif rendah dimana dari parameter pendidikan pada skala nasional nampaknya masih jauh tertinggal di banding kota lain di Indonesia. Diukur dari indikator kependudukan strategis sektor pendidikan masih menempati peringkat ke-50 dari 60 kota di Indonesia sekalipun pada bidang tertentu beberapa pelajar telah mampu mencapai peringkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, mulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari prosentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu

wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM). Secara umum kondisi pendidikan dasar di Kota Makassar dapat digambarkan oleh Tabel berikut:

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar Tahun 2003-2017

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah
2003	250,5
2004	252
2005	243,7
2006	242,2
2007	249
2008	249,6
2009	237,8
2010	246
2011	245,2
2012	261,7
2013	260,2
2014	271,2
2015	231,41
2016	231,3
2017	272,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Adapun cara untuk menghitung banyaknya angka partisipasi sekolah adalah menggunakan rumus berikut:

- a) $APS(7-12) = \{(\text{Jumlah penduduk berumur } 7-12 \text{ tahun yang masih sekolah: jumlah penduduk umur } 7-12 \text{ tahun}) \times 100\}$.
- b) $APS(13-15) = \{(\text{Jumlah penduduk berumur } 13-15 \text{ tahun yang masih sekolah: jumlah penduduk umur } 13-15 \text{ tahun}) \times 100\}$
- c) $APS(16-18) = \{(\text{Jumlah penduduk berumur } 16-18 \text{ tahun yang masih sekolah: jumlah penduduk umur } 16-18 \text{ tahun}) \times 100\}$

3. Perkembangan Upah Minimum di Kota Makassar

Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat berpengaruh terhadap angka pengangguran. Karena itu pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Secara umum, kondisi upah minimum di Kota Makassar mengaami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat. Namun yang terjadi, besarnya upah yang ditetapkan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga kerja. Perkembangan tingkat upah minimum provinsi sulawesi selatan yang berlaku juga di Kota Makassar terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 4.2
Perkembangan Tingkat Upah di Kota Makassar
Tahun 2003 – 2017

Tahun	UMR Pertahun (RP)
1	2
2003	415.000
2004	455.000
2005	510.000
2006	612.000
2007	673.200
2008	740.000
2009	905.000
2010	1.000.000
2011	1.100.000
2012	1.200.000
2013	1.440.000
2014	1.800.000
2015	2.000.000
2016	2.250.000
2017	2.435.625

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018

Data upah minimum diatas dapat diketahui bahwa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan tingkat kenaikan inflasi, sehingga tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat.

4. Perkembangan Upaha Minimum di Kota Makassar

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin diperkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan fenomena fenomena seperti anak jalanan, pengemis dan geng motor diperkotaan. Fenomena kemiskinan yang terjadi di kota Makassar sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan banyak pemuda-pemudi di Kota Makassar yang bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya.

nya. Ada beberapa faktor munculnya kemiskinan yaitu pertama karena faktor kurangnya rejeki yang diberikan oleh Allah, selain itu ada juga faktor perlakuan dari masyarakat sendiri yang tidak ingin bekerja maksimal dan hanya ingin menerima bantuan dari pemerintah. Selanjutnya karena faktor kemalasan, dimana tidak adanya motivasi individual dari masyarakatnya untuk meningkatkan perekonomiannya. Kota Makassar merupakan sumber potensi pembangunan bahkan orang daerah banyak yang datang mencari pekerjaan tapi karena masyarakatnya merasa cukup puas dan kesenangan sesaat dimana dia tidak mau untuk berusaha dan meningkatkan kemampuannya (Saidy dan Hidayah 2018: 51).

Tabel 4.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar
Tahun 2003 – 2017

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2003	15,53
2004	23,1
2005	33,03
2006	68,45
2007	70,1
2008	145,17
2009	209,58
2010	233,83
2011	242,03
2012	256,78
2013	273,23
2014	281,92
2015	321,09
2016	347,72
2017	369,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2018

Data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah pengangguran di Kota Makassar.

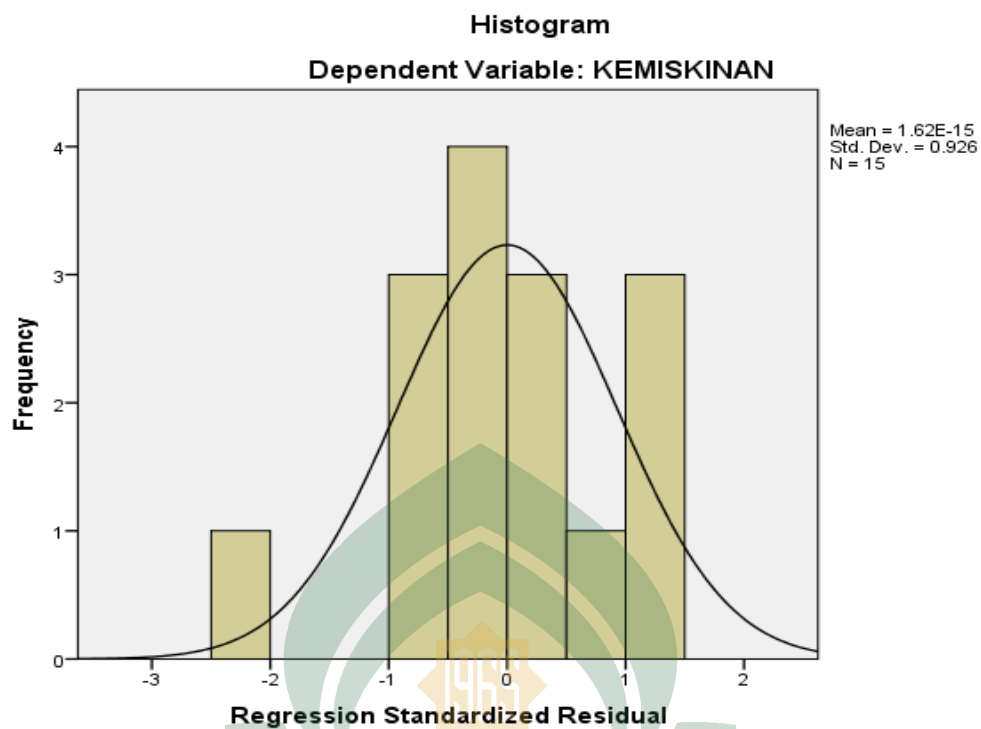
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi.

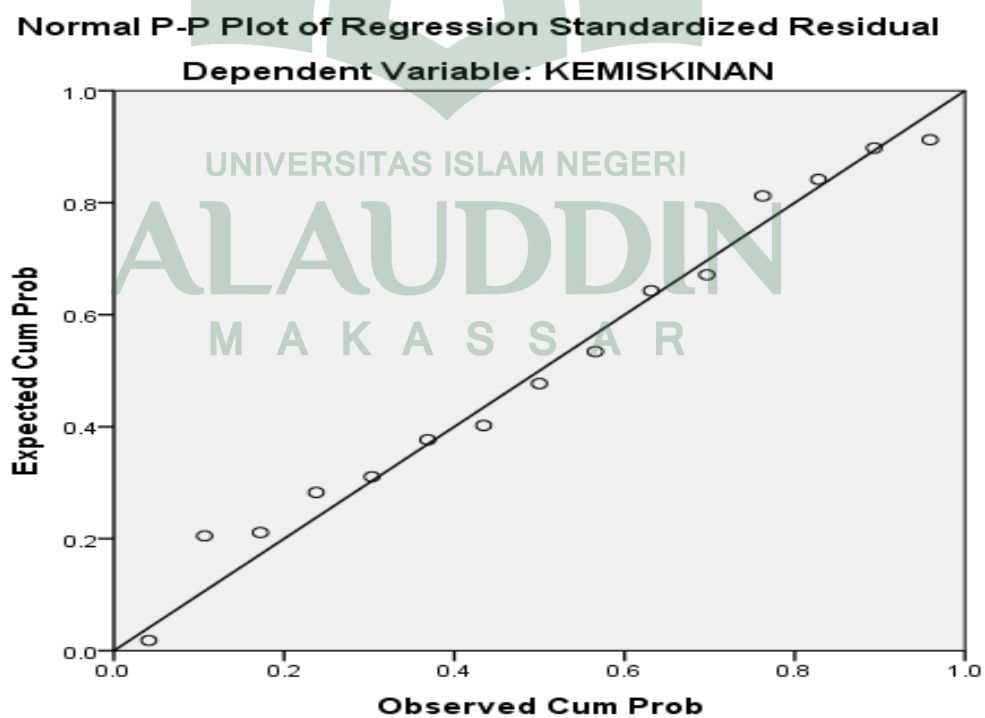
a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan metode untuk mengetahui normal-tidaknya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik secara histogram atau dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dan residualnya dan mengikuti satu garis lurus diagonal yang terdistribusi normal.



Gambar 4.1 Grafik Histogram (Sumber: Output SpSS 22, diolah 2018)

Gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya.



Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot (Sumber: Output SPSS 22, diolah 2018)

Gambar 4.2 *Normal Probability Plot* diatas menunjukkan bahwa data me-nyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variabe bebas. Tolerance mengukur variabilitas variabe bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabe bebas lainnya. Jika nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable Independen	Tolerance	VIF	Keputusan
Pendidikan	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas
Upah Minimum	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22 (2018)

Hasil regresi dengan menggunakan SPSS 22, maka dari matriks korelasi terlihat bahwa tampilan output VIF dan Tolerance mengindikasikan tidak terdapat multikolineritas. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan peng-ganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin Watson.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.208

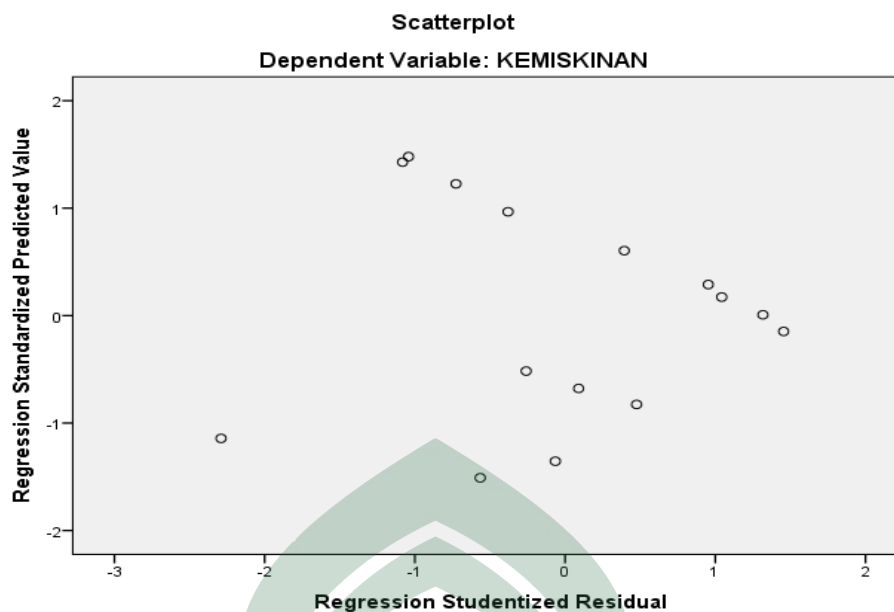
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22 (2018)

Berdasarkan ketentuan pengujian Durbin Watson, maka diperoleh nilai dW 1,208 dan $dL < dW < 4 - dU$ ($0,9455 < 1,208 < 1,5432$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi maka bisa dilakukan dengan metode analisis grafik dengan mengamati *scatterplot*.

Gambar *Scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Makassar.



Gambar 4.3: Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sumber: Output SPSS 22, diolah 2018)

2. Regresi Berganda

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu pendidikan dan upah minimum serta satu variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian model regresi dengan bantuan program SPSS 22.

Tabel 4.6
Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	T hitung	Prob
	(B)			
Constant	-15.586	14.129	-1.103	.292
Pendidikan (X_1)	-.483	2.583	-.189	.854
Upah Minimum (X_2)	1.674	.219	7.658	.000
R- Square : .832		S.E Regression : .47324		
R : .912 ^a		F- Statistik : .29.769		
Adjusted R-Square : .804		Prob. F- Statistik : .000		

Hasil uji SPSS 22 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln \beta_0 - \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

$$Y = -15.586 - 0,483 + 1.674 + \mu$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasi nilai koefisien regresi sebagai berikut:

- a) Jika segala sesuatu variabel bebas dianggap konstan, maka kemiskinan di Kota Makassar sebesar 15.586.
- b) Koefisien regresi $X_1 = -0,483$ artinya pendidikan memiliki arah hubungan yang berbanding terbalik dengan kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0,483.
- c) Koefisien regresi $X_2 = 1,674$, artinya upah minimum memiliki arah hubungan yang berbanding lurus (searah) dengan kemiskinan di kota makassar. Hal ini mengandung arti bahwa peningkatan upah, akan meningkatkan kemiskinan di Kota Makassar sebesar 1,674.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dilakukan uji koefisien determinasi R^2 , uji koefisien regresi serentak (uji F) serta uji signifikansi parameter individual (uji t).

- a) Koefisien Determinasi R^2

Penelitian ini, untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R Square (R^2). Besarnya nilai R^2 sebesar 0,832. Nilai tersebut mendekati angka 1 maka variabel bebas terhadap variabel terikat kuat atau sebesar 83,2% kemiskinan di Kota Makassar dipengaruhi oleh pendidikan dan upah minimum. Sedangkan sisanya 16,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

- b) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau F_{test} bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-F diperuntukkan guna melakukan uji regresi secara bersamaan atau simultan. Dari hasil regresi berganda, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 29.769. Sedangkan F_{tabel} df 2 = 2,12 sehingga $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($29.769 > 3,89$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pendidikan dan Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar.

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .

- (1) Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- (2) Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 merupakan rekapitulasi hasil dari pengujian variabel bebas yaitu pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

a) Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 22 untuk variabel pendidikan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,189 dengan tingkat signifikan 0,854. Dengan demikian diperoleh $t_{\text{hitung}} (-0,189) < t_{\text{tabel}} (2.16037)$

sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar

b) Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 22 untuk variabel upah minimum diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7.658 dengan tingkat signifikan 0,000. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} (7.658) > t_{tabel} (2.16037)$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi upah minimum maka tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Tabel 4.7
Uji Parsial (Uji T)

Model	Uji statistik (uji t)		
	t-statistik	t-tabel	sig
Constant	-1.103	2.365	.292
Pendidikan	-.189	2.365	.854
Upah minimum	7.658	2.365	.000

Sumber: output SPSS 22 (Data Diolah, 2018)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interpretasi model secara rinci atau spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hasil regresi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pendidikan yang diukur menggunakan angka partisipasi sekolah diperoleh hasil bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan angka signifikan 0,854 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian

ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suprianto dkk (2017) yang menyatakan tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Namun pada penelitian ini tingkat pendidikan yang diukur dengan angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan tingkat pendidikan tidak seiring dengan peningkatan jenis ketersediaan lapangan kerja, sehingga semakin banyaknya orang yang telah lulus sekolah dan siap memasuki dunia kerja, maka pengangguran juga akan semakin bertambah. Peneliti juga menganggap bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat membuat mereka menuntut upah yang tinggi atau mereka lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu, tidak selamanya tingkat kemiskinan diukur dengan pendidikan seseorang karena saat ini banyak orang yang sukses dengan jalur berwirausaha dan pendidikan yang tidak terlalu tinggi.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hasil regresi pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan angka signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kedua yang dalam penelitian ini diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum, maka kemiskinan akan semakin meningkat.

Meningkatnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terdidik yang ada di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam artian pengangguran terdidik memilih pekerjaan yang sesuai atau diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mempertimbangkan upah yang akan didapatkan. Sementara itu dipihak perusahaan justru menurunkan kuantitas pekerja yang diminta karena semakin tingginya upah yang ditetapkan, perusahaan cenderung melakukan pengurangan tenaga kerja atau hanya mempertahankan pekerja yang ada. Pengangguran yang semakin banyak justru sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Selain itu salah satu faktor bertambahnya jumlah pengangguran dan kemiskinan adalah besarnya inflasi dan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap dollar Amerika (Supriyadi dan Kausar, 2016: 204). Pelemahan nilai tukar rupiah berakibat pada naiknya harga-harga barang di pasaran. Tidak hanya barang-barang seperti elektronik atau kendaraan, tetapi juga berimbas pada harga kebutuhan bahan pokok. Menurut pengamat ekonomi Marwan Batubara (2018) dikutip dari (www.koran-jakarta.com), mengatakan ketika rupiah melemah dan dollar AS menguat dapat menyebabkan kemiskinan bertambah karena tidak sedikit bahan pangan yang berasal dari impor. Jadi walaupun ada kenaikan upah minimum namun tidak sejalan dengan turunnya harga pokok, kemiskinan akan sulit teratasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja terdidik yang lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keahlian yang dimiliki, maka pengangguran akan semakin bertambah.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya upah minimum maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan upah minimum yang tinggi tidak dibarengi dengan harga kebutuhan pokok yang rendah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk pengentasan kemiskinan lebih difokuskan dengan memberi berbagai pelatihan guna meningkatkan keahlian tambahan, selain itu perlunya bantuan permodalan dari pemerintah.
2. Faktor pendidikan dan keterampilan hendaknya menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi di Kota Makassar karena tingkat pendidikan sangat menentukan bagi setiap pencari kerja dalam memasuki pasar kerja. Untuk itu diperlukan fasilitas pendidikan formal yang memadai.
3. Selain itu lembaga pendidikan juga memainkan peran penting, dimana para pelajar bukan hanya menuntut ilmu tetapi dapat diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya agar nantinya dapat bersaing dengan para pencari kerja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Reza Attaburrobbi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 201. *Economics Development Analysis Journal* 2 (4). 2013: h. 409-426.
- Aristina, Ita dkk. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 6 No. 5. Mei 2017: h. 677-704
- Departemen Agama RI. *Mushaf AL-Qur'an Terjemah*. Pena. 2002.
- Fitriani. Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. Program Studi Ekonomi Pembangunafakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat. 2016.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ginting, Ari Muliarta dan Rasbin. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1. Desember 2010: h. 279-312.
- Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Muyassar* jilid 1,2,3. Solo 2011.
- Hartomo dan Arnicun Aziz. Ilmu Dasar Sosial. Bumi Aksara 2009.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013.
- Jhingan, M. L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafind. 2007.
- Kurniawati, Ardhian., Beni Teguh Gunawan dan Disty Putri Ratna Indrasari. Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014. *Journal Of Research In Economics And Management*. Volume 17, No. 2.. 2017: h.233-252.
- Maulidah, Fadliliah dan Ady Soejoto. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan* Vol. 3. No. 1. 2015: h. 227-240.
- Majid, M. Shabri Abd. Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan* Vol. 8, No. 1. Juli - Desember 2014 Hal: 15-37.

- Merdekawaty, Rahmah., Dwi Ispriyanti dan Sugito. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 No. 3. 216: h. 525-534.
- Noor, Munawar. Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Semarang). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 2014: h. 130-141.
- Nugroho, Priyo Adi. Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013. PROGRAM Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.
- Qurratu'ain, Almira Qatrunnada dan Vita Ratnasari. Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel *Jurnal Sains dan Seni ITS* Vol. 5 No. 2. 2016: h. 265-270.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Tentang Upah Minimum Nomor: PER-01/MEN/1999. 1999.
- Rahmawati, Kurnia Dwi. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013. Uin Sunan Kalijaga. 2017.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 78 Tentang Pengupahan. 2005.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta. 2003.
- Rika, Darma S., Munawaroh dan Dita Puruwita. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta. *Econosains* Vol. X No. 2. Agustus 2012: h. 144-157.
- Saidy, Emily Nur dan Nurul Hidayah. Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dan Upaya Penanggulangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Laa Maisyir*, Vol. 5, No. 1. Januari 2018: h. 43-59.
- Sartika, Cica., M.Yani Balaka dan Wali Aya Rumbia. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)* Vol .1 (1). April 2016: h. 106-118.

- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial. Penerbit: Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sumarsono, Sonny. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Sumarsono, Sonny. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2003.
- Supriyadi, Edy dan Devi Roza Krisnandhi Kausar. Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *Journal of EST*, Vol. 2 No. 3. Desember 2016: h. 204-212.
- Suprianto., Binar Dwiyanto Pamungkas dan Julia Zikriana. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 14 No 2. Agustus 2017:h. 187 – 204
- Suryawati, Chriswardani. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty. *JMPK* Vol. 08 No.03. September 2005: h. 121-12
- Suwarno "Pengantar umum pendidikan / Suwarno "1982 : Jakarta : IKAPI
- Syam, Noor Mohammad. Filsafat kependidikan dasar filsafat kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Ustama, Dicky Djatnika. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *JIAPK* 6, No. 1. Januari 2009:1-12.
- Yacoub, Yarlina. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos* 8, no 3. Oktober 2012: h. 176-185.
- Zuhdiyaty, Noor dan David Kaluge. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka* 11 no. 2. Februari 2017: h. 27 - 31
- Zulkifli. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan. *Economics, Social, and Development Studies*. Vol. 3 No. 2. Desember 2016 h. 90-106.

<http://www.koran-jakarta.com/pelemahan-rupiah-picu-kemiskinan/> 2019. Diakses
tgl 19 Januari 2018.



L

A

M

P

I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

A

N

LAMPIRAN 1

DATA HASIL LOGARITMA NATURAL PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN TINGKAT KEMISKINAN

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah LN
2003	250,5
2004	252
2005	243,7
2006	242,2
2007	249
2008	249,6
2009	237,8
2010	246
2011	245,2
2012	261,7
2013	260,2
2014	271,2
2015	231,41
2016	231,3
2017	272,17

Tahun	UMR Pertahun (RP) LN
1	2
2003	12.94
2004	13.03
2005	13.14
2006	13.32
2007	13.42
2008	13.51
2009	13.72
2010	13.82
2011	13.91
2012	14.00
2013	14.18
2014	14.40
2015	14.51
2016	14.63
2017	14.71

Tahun	Tingkat Kemiskinan LN
2003	15,53
2004	23,1
2005	33,03
2006	68,45
2007	70,1
2008	145,17
2009	209,58
2010	233,83
2011	242,03
2012	256,78
2013	273,23
2014	281,92
2015	321,09
2016	347,72
2017	369,00

LAMPIRAN 2

Regression

Hasil Uji Multikolinieritas

Variable Independen	Tolerance	VIF	Keputusan
Pendidikan	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas
Upah Minimum	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas

Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.208

Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	T hitung	Prob
Constant	-15.586	14.129	-1.103	.292
Pendidikan (X ₁)	-.483	2.583	-.189	.854
Upah Minimum (X ₂)	1.674	.2197	7.658	.000
R-Square : .832 R : .912 ^a Adjusted R-Square : .804 S.E Regression : .47324 F- Statistik : .29.769 Prob. F- Statistik : .000				

Uji Parsial (Uji T)

Model	Uji statistik (uji t)		
	t-statistik	t-tabel	sig
Constant	-1.103	2.365	.292
Pendidikan	-.189	2.365	.854
Upah minimum	7.658	2.365	.000

